



**INDEF** / Institute for Development  
of Economics and Finance



# PEMIKIRAN **100** EKONOMI INDONESIA

ESTAFET KEPEMIMPINAN BARU  
MENUJU AKSELERASI EKONOMI

Editor:

Malik Ruslan, Riza Annisa Pujarama, Eisha Maghfiruha Rachbini



**INDEF** / *Institute for Development  
of Economics and Finance*

# **ESTAFET KEPEMIMPINAN BARU MENUJU AKSELERASI EKONOMI**

---

PEMIKIRAN 100 EKONOM INDONESIA

Editor:  
Malik Ruslan  
Riza Annisa Pujarama  
Eisha Maghfiruha Rachbini

# **Estafet Kepemimpinan Baru Menuju Akselerasi Ekonomi**

Pemikiran 100 Ekonom Indonesia

Hak Cipta © Institute for Development of Economics and Finance  
(INDEF)

Editor:

Malik Ruslan

Riza Annisa Pujarama

Eisha Maghfiruha Rachbini

Tata Letak: Sarwo Edhie

Desain Cover: Hafdal Syahputra

ISBN: 978-623-6999-36-3

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian  
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit

Januari, 2025

INDEF

Jl. Batu Merah No. 45 Pejaten Timur, Jakarta 12510

Telp. 021 7901001

Email: [indef@indef.or.id](mailto:indef@indef.or.id)

[www.indef.or.id](http://www.indef.or.id)

# Sekapur Sirih

Indonesia memasuki babak baru pemerintahan periode 2025-2029. Periode pemerintahan ini merupakan periode penting sebagai landasan pencapaian Visi Indonesia Emas 2045 yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Lima sasaran utama Visi Indonesia 2045 adalah: 1. Pendapatan per kapita setara negara maju; 2. Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang; 3. Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat; 4. Daya saing sumber daya manusia meningkat; dan 5. Intensi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menurun menuju *net zero emission*. Namun demikian, upaya mencapai target tersebut bukanlah hal yang mudah dilakukan, terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan, belum lagi tantangan global semakin meningkat.

Pekerjaan rumah perekonomian domestik yang masih belum terselesaikan adalah perlambatan pertumbuhan ekonomi yang terus berlangsung, sementara itu mesin-mesin pertumbuhan ekonomi belum mampu bertransformasi dengan cepat. Investasi yang mengalir belum mampu memberikan dorongan yang besar pada pertumbuhan ekonomi, hal ini terefleksikan dengan angka ICOR yang masih tinggi. Konsumsi rumah tangga yang menjadi penyumbang terbesar pertumbuhan PDB mengalami penurunan akibat pelemahan daya beli. Pelemahan daya beli ini juga tergambar dari menurunnya jumlah kelas menengah di Indonesia dalam kurun 5 tahun terakhir. Belanja yang dilakukan pemerintah, meski secara nominal terus meningkat, namun belum dapat memberikan efek pengganda yang lebih jauh. Porsi pengeluaran konsumsi pemerintah terhadap pembentukan PDB pada triwulan III 2024, sebesar 7,21 persen. Kegiatan ekspor-impor Indonesia belum banyak berubah, meskipun masih mengalami surplus neraca perdagangan, namun ekspor masih bertumpu pada komoditas

yang nilai tambahnya masih rendah. Perlu ada percepatan transformasi ekonomi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Kinerja sektoral perlu mendapat perhatian lebih terutama pada sektor industri manufaktur yang terus mengalami perlambatan. Bahkan di 2024, kinerjanya terus merosot, terutama pada industri-industri manufaktur yang padat karya yang menyebabkan peningkatan angka pengangguran karena penutupan pabrik terus berlanjut yang menciptakan gelombang PHK. Sektor fiskal tak kalah pelik, karena belanja yang terus meningkat namun pendapatan perpajakan masih cenderung stagnan. Bahkan setelah UU Harmonisasi Perpajakan angka rasio pajak tidak mengalami perubahan yang signifikan. Sementara itu kebutuhan dana melonjak pada periode 2025-2029 karena utang jatuh tempo yang melonjak dan pembayaran bunga utang yang membengkak. Sektor moneter dan keuangan masih dihadapkan pada suku bunga yang tinggi, tren pelemahan nilai rupiah, dan penyerapan kredit yang masih rendah.

Perlambatan ekonomi domestik tak lepas dari tantangan ekonomi global yang meningkat dan semakin kompleks, ketegangan geopolitik yang terus meningkat, ditambah lagi dengan perubahan peta geopolitik karena pemilihan umum yang dilakukan di 50 negara pada 2024. Sehingga untuk mengantisipasinya diperlukan penguatan ekonomi domestik.

Sementara itu pencapaian target indikator kesejahteraan meski mengalami perbaikan, namun masih menyisakan pekerjaan yang berat. Tingkat kemiskinan, walaupun trennya menurun, namun kian sulit untuk ditekan. Di sisi lain tingkat ketimpangan masih bertengger tinggi. Tingkat pengangguran meskipun turun namun justru menyisakan pekerjaan rumah yang berat karena tingginya angka pengangguran muda (menurut usia) dan tingginya pengangguran lulusan sekolah menengah atas/ sederajat dan lulusan perguruan tinggi. Capaian Indeks Pembangunan Manusia mengalami peningkatan skor, namun masih timpang antar provinsi. Kualitas sumber daya manusia Indonesia dalam peringkat global masih masuk dalam kategori rendah. Apalagi ditambah dengan merosotnya capaian kemampuan literasi, numerasi, dan sains di tingkat global.

Buku Pemikiran 100 Ekonom Indonesia merupakan sumbangsih pemikiran para ekonom Indonesia yang memberikan gambaran mengenai kondisi dan tantangan ekonomi Indonesia yang disertai dengan rekomendasi, solusi, dan strategi untuk perbaikan dan penguatan ekonomi Indonesia sebagai wujud kecintaan pada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada 2024, tajuk Buku Pemikiran 100 Ekonom Indonesia adalah **Estafet Kepemimpinan Baru Menuju Akselerasi Ekonomi**. Buku Pemikiran 100 Ekonom Indonesia kali ini diharapkan dapat memberikan masukan rekomendasi pada pemerintahan yang baru untuk dapat mengakselerasi ekonomi agar dapat mewujudkan target pertumbuhan ekonomi dalam rangka mencapai Indonesia Emas 2045 dan mewujudkan cita-cita bangsa yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945 yaitu: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Buku Pemikiran 100 Ekonom Indonesia diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi dan tantangan ekonomi Indonesia serta upaya untuk memberikan manfaat pada seluruh masyarakat Indonesia dalam memahami kondisi ekonomi Indonesia dan upaya yang dapat dilakukan untuk menghadapi tantangan dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan Indonesia Emas 2045.

Sebagai penutup, kami mengucapkan terima kasih kepada para ekonom, sponsor, dan tim pendukung atas kontribusinya sehingga Buku Pemikiran 100 Ekonom Indonesia dapat diterbitkan. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat untuk perekonomian Indonesia yang lebih baik.

Jakarta, Desember 2024

Tim Penyusun



# Daftar Isi

<b>Sekapur Sirih</b>	<b>iii</b>
<b>Daftar Isi</b>	<b>vii</b>
<b>Klaster 1 Kemandirian Pangan dan Energi untuk Ekonomi Berkelanjutan</b>	<b>1</b>
1.1. Emas Biru Indonesia: Membangun dari Laut ke Darat <i>Asmiati A. Malik</i>	3
1.2. Transformasi Pertanian dan Pemberdayaan Kelas Menengah <i>Bustanul Arifin</i>	25
1.3. Menjembatani Trilema Pembangunan Indonesia: Pertumbuhan Tinggi, Keadilan Sosial, dan Kelestarian Lingkungan <i>Imaduddin Abdullah</i>	37
1.4. Trilema Pemanfaatan Minyak Sawit: Strategi Berkelanjutan untuk Pangan, Energi, dan Ekspor <i>M. Fadhil Hasan</i>	51
1.5. Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Melalui Pangan, Energi dan Lingkungan <i>Anggawira</i>	59
1.6. Tantangan dan Peluang Penundaan Regulasi Anti Deforestasi Uni Eropa (EUDR) <i>Berly Martawardaya</i>	67
1.7. Celah Pendanaan Transisi Energi kala Fiskal Menyempit <i>Bhima Yudhistira Adhinegara</i>	73
1.8. Energi Terbarukan dan Industri Halal di Indonesia: Isu Syariah, Politik dan Tata Kelola <i>Murniati Mukhlisin</i>	83
1.9. Keuangan Berkelanjutan untuk Mencapai Net Zero Emission: Peran Krusial, Tapi Jalan Masih Terjal <i>Prima Naomi</i>	93
1.10. Partisipasi Produk Pertanian dan Produk Hilirnya dalam Rantai Nilai Global <i>Sahara dan Rosmatiarra</i>	109
1.11. Peningkatan Pungutan Produksi Batubara: Transisi Energi di Tengah Keterbatasan Fiskal <i>Tata Mustasya</i>	125

1.12. Trilemma Swasembada Pangan, Swasembada Energi, dan Pembangunan Berkelanjutan <i>Dina Nurul Fitria</i>	133
1.13. Strategi Penurunan Emisi Karbon Dari Sektor AFOLU Untuk Mencapai Net Zero Emission <i>Lukytawati Anggraeni</i>	145
<b>Klaster 2 Sinergi Kebijakan Industri, Investasi, dan UMKM dalam Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi</b>	153
2.1. Masa Depan UKM Baru di Indonesia: Peluang, Tantangan, dan Strategi Pertumbuhan <i>Ahmad Badawi Saluy, Unang Toto Handiman, Masydzulhak, Novawiguna Kemalasari</i>	155
2.2. Hilirisasi dan Persaingan Usaha <i>Eugenia Mardanugraha</i>	183
2.3. Mendorong Kemitraan UMKM dalam Integrasi Rantai Pasok Industri: Sebuah Pekerjaan Rumah bagi Pemerintah <i>Guntur Saragih</i>	199
2.4. Kolaborasi dan Digitalisasi Program Makan Bergizi Gratis <i>Izzudin Al Farras Adha.</i>	209
2.5. Hubungan Ekonomi Indonesia dengan China Perlu Penyesuaian Arah <i>Moch Faisal Karim</i>	217
2.6. Transformasi Ekonomi Indonesia: Deindustrialisasi Atau Involusi? <i>Lukman Hakim</i>	227
2.7. Urgensi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Mendukung Industrialisasi <i>Ahmad Heri Firdaus</i>	235
2.8. Big Data dan AI Membantu Pemerintah dalam Membangun Lokapasar yang Ramah UMKM <i>Omar Abdillah</i>	241
2.9. Sektor Jasa Riset, Rekayasa dan Desain Industri: Kunci Akselerasi bagi Industri <i>Widyastutik</i>	249
2.10. Hilirisasi Industri Sawit Menuju Indonesia Emas <i>Esther Sri Astuti S.A</i>	261
2.11. Dampak Hilirisasi Pangan Terhadap Pencapaian Sasaran Makroekonomi <i>Muhammad Firdaus</i>	269

2.12. Redefinisi, Peran dan Kebijakan Usaha Mikro dan Kecil (UMK)	<i>F.X Sugiyanto</i>	275
<b>Klaster 3 Harmonisasi Kebijakan Fiskal, Moneter, dan Keuangan untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi yang Berkualitas</b>		<b>299</b>
3.1. Kelas Menengah Indonesia: Banting Tulang, Sisa Tulang	<i>Aviliani</i>	301
3.2. Membangun Kebijakan Fiskal dan Moneter yang Seirama	<i>Agus Herta Sumarto</i>	313
3.3. Transformasi Ekonomi Indonesia Dalam Rangka Membangun Kelas Menengah Yang Besar	<i>Didin S. Damanhuri</i>	323
3.4. Saatnya Eksekusi 4 Langkah Revolusioner Pajak	<i>Darussalam</i>	341
3.5. Estimasi Nilai Penghematan APBN dari Pengurangan Korupsi	<i>D. S. Priyarsono</i>	355
3.6. Strategi Stabilisasi Fiskal Tanpa Proyek Mercusuar	<i>Ahmad Deni Daruri</i>	361
3.7. Indonesia Emas 2045: Mimpi Besar di Tengah Realitas Kesenjangan, Arah dan Gap	<i>Achmad Nur Hidayat</i>	365
3.8. Tantangan Pelik Utang Pemerintah Baru Periode 2025-2029	<i>Riza A Pujarama dan Didik J. Rachbini</i>	375
3.9. Potensi Pembiayaan Kreatif untuk Infrastruktur Green University di Indonesia	<i>Indra Gunawan</i>	383
3.10. Kebijakan Moneter Hijau	<i>Muhammad Edhie Purnawan</i>	399
3.11. Reformasi Struktural Dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Tinggi	<i>Handi Rizza</i>	411
3.12. Pajak Kekayaan untuk Orang Super Kaya di Indonesia	<i>Nurhastuty Kesumo Wardhani dan Wirasto Pribadi</i>	423

3.13. Kelas Menengah Tumbuh, Daya Beli Tangguh <i>Eko Listiyanto</i>	431
3.14. Arah Kebijakan dan Strategi Peningkatan Kelas Menengah dan Ekspansi Daya Beli <i>M. Rizal Taufikurahman</i>	437
3.15. Kelas Menengah di Tengah Gempuran Ketidakpastian <i>Candra Fajri Ananda</i>	449
3.16. Menakar Prospek dan Tantangan Ekonomi Indonesia 2025 <i>Ryan Kiryanto</i>	459
3.17. Inovasi Sumber Dana untuk Pembiayaan Perumahan <i>Winang Budoyo &amp; Fauzan Zamahsyarie</i>	467
3.18. BPI Danantara, Idealnya Menjadi Petani Moneter <i>Yanuar Rizky</i>	477
3.19. Strategi Kebijakan Pendalaman Sektor Keuangan untuk Mendukung Pencapaian Target Pertumbuhan Ekonomi 8% dari Pemerintahan Baru <i>Telisa Aulia Falianty</i>	485
3.20. Re-formalisasi Ekonomi Untuk Ketajaman Fiskal <i>Fakhrul Fulvian</i>	519
3.21. Kelas Menengah: Kunci Akselerasi Ekonomi Indonesia <i>Dian Ayu Yustina</i>	527
3.22. Perbaikan Sistem Targeting dengan Menerapkan <i>On-Demand Application</i> <i>Vivi Alatas</i>	537

**Klaster 4 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan untuk Pembangunan Berkualitas** **549**

4.1. Persoalan Rumit Sektor Ketenagakerjaan <i>Abdul Manap Pulungan</i>	551
4.2. Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja Pertanian Indonesia: Tantangan dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia <i>Alla Asmara</i>	559

4.3. Efektivitas Belanja Pendidikan dan Kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia <i>Ferry Prasetya</i>	575
4.4. Pengembangan Modal Manusia sebagai Fondasi Visi Indonesia Emas 2045 <i>Gumilang Aryo Sahadewo</i>	591
4.5. Kualitas SDM Ahli Ekonomi Dengan Nilai-Nilai Luhur, Menuju Indonesia Maju <i>Jossy Prananta Moeis</i>	605
4.6. Strategi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Pendidikan Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi <i>Rina Indiasuti</i>	619
4.7. Dampak Perbaikan Gizi Masyarakat Terhadap Optimalisasi Manfaat Bonus Demografi <i>Sonny Harry B Harmadi</i>	637
4.8. Ekonomi Politik Kebijakan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Indonesia <i>Muhammad Findi</i>	647
4.9. Menyelamatkan Kelas Menengah Melalui Kontrak Sosial yang Komprehensif <i>Wisnu Setiadi Nugroho &amp; Zahra Amalia Syarifah</i>	671
4.10. Pentingnya Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Pendidikan dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi <i>Tanti Novianti</i>	691
4.11. Investasi Pendidikan: Kunci Pembangunan SDM Mendorong Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi <i>Eisha Maghfiruha Rachbini</i>	703
4.12. Menjadikan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Sebagai Prioritas Nasional <i>Denni Puspa Purbasari</i>	713
4.13. Pembangunan Ekonomi Era Digital: Peran Kecerdasan Buatan <i>Moch. Doddy Ariefianto</i>	727
4.14. Transformasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi untuk Pendidikan Berkualitas Menuju Indonesia Emas 2045 <i>Deniey A. Purwanto</i>	739

Klaster 4

**Penguatan Kapasitas  
Sumber Daya Manusia dan  
Ketenagakerjaan untuk  
Pembangunan Berkualitas**

## 4.7. Dampak Perbaikan Gizi Masyarakat Terhadap Optimalisasi Manfaat Bonus Demografi

**Sonny Harry B. Harmadi**

*Institut Teknologi Sepuluh Nopember*



*Sonny Harry Budiutomo Harmadi* adalah seorang akademisi dan profesional. Saat ini tercatat sebagai dosen tetap di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) dan mengemban amanah Komisaris Utama di PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung. Selama 16 tahun terakhir, Sonny menerima berbagai penugasan diantaranya sebagai Deputy Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan Kemenko PMK, Plt. Deputy Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana Kemenko PMK, Staf Ahli Bidang Kependudukan Kemenko PMK, Staf Khusus Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Kepala Lembaga Demografi FEB Universitas Indonesia. Selama masa pandemi Covid-19, Sonny dipercaya sebagai Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan Covid-19 Nasional. Selain itu, Sonny sudah 6 tahun menjadi anggota Forum Masyarakat Statistik. Saat ini Sonny menjadi Faculty Member di Bank Indonesia Institute untuk bidang Ekonomi Regional. Sebagai profesional, Sonny pernah menjadi konsultan di ADB, GTZ, UNDP Regional Center in Colombo Sri Lanka, UNDP Timor-Leste, dan penasihat ekonomi Menteri Pertanian-Perikanan Timor-Leste. Dalam kapasitas organisasi, Sonny saat ini merupakan Ketua Umum Koalisi Kependudukan Indonesia dan Wasekjen Kwarnas Gerakan Pramuka. Beberapa penghargaan yang pernah diraihnyanya antara lain Dosen Berprestasi Nasional (2010), Dosen Berprestasi UI Peringkat 1 (2010), Peneliti Berprestasi UI Peringkat 1 (2009), dan Peneliti Muda Terbaik UI (2008)

Indonesia sejak 2012 telah memasuki periode bonus demografi, dan selama 2024 hingga 2029 mendatang, kita berada

dalam periode terbaik bonus demografi yang disebut dengan istilah *the window of opportunity*. Pemerintahan baru yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto bersama Wapres Gibran Rakabuming menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai angka 8 persen per tahun agar pada 2045 mendatang Indonesia bisa menjadi negara maju. Syarat Indonesia menjadi negara maju di antaranya tercermin dari dua indikator yaitu, (i) pendapatan perkapita tinggi (indikator pembangunan ekonomi) dan, (ii) usia harapan hidup melampaui angka 80 tahun (indikator pembangunan manusia). Kontribusi sektor maritim dan industri manufaktur terhadap perekonomian akan terus ditingkatkan sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.

Secara bertahap, pemerintah menargetkan kontribusi PDB maritim terus naik dari sekitar 7 persen saat ini menjadi 9 persen (2029), hingga mencapai 15 persen di tahun 2045. Sedangkan fenomena deindustrialisasi akan diatasi dengan target kontribusi sektor industri pengolahan yang terus meningkat hingga menyumbang hampir sepertiga perekonomian nasional pada 2045. Salah satu argumen penting mengapa Indonesia perlu mengejar pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen per tahun ialah faktor demografi. Dengan melihat tren demografi saat ini, angka kelahiran total (TFR) sudah mencapai 2,1 anak per perempuan dan bahkan pada 2032 mendatang diproyeksikan sudah di bawah 2,0 anak per perempuan. Di saat bersamaan, usia harapan hidup terus meningkat, sehingga pada 2045 mendatang, diproyeksikan penduduk lansia (lanjut usia) di Indonesia akan mencapai 20,74 persen dari keseluruhan penduduk. Pada saat itu rasio ketergantungan sudah mencapai 52,01 dan Indonesia tidak lagi berada dalam periode bonus demografi.

Indonesia masih memiliki waktu sekitar 16 tahun lagi untuk mengoptimalkan periode bonus demografi sebelum masuk ke *ageing population period*. Ada ungkapan sederhana yang perlu kita pahami bersama bahwa “kita harus kaya sebelum tua”. Sehingga saat lanjut usia nanti, kita mampu membiayai secara mandiri, tidak membebani generasi usia produktif. Indonesia harus mampu keluar dari perangkap pendapatan menengah

(*middle income trap*) dengan pertumbuhan ekonomi 7-8 persen per tahun. Namun perlu dipahami bahwa pertumbuhan ekonomi sangat ditentukan oleh produktivitas faktor produksi, salah satunya tenaga kerja. Produktivitas tenaga kerja sangat ditentukan oleh kualitas kesehatan dan pendidikan. Tetapi, prasyarat utama untuk meningkatkan derajat kesehatan dan kualitas pendidikan masyarakat ialah gizi.

Faktanya, hingga saat ini Indonesia masih menghadapi tantangan gizi penduduk. Bonus demografi berpotensi mempercepat pertumbuhan ekonomi karena penduduk didominasi usia produktif (69,05 persen pada 2024 ini, proyeksi penduduk berdasarkan Sensus Penduduk 2020). Namun, bonus demografi barulah sebatas potensi. Menjadi bermanfaat jika kita mampu mengonversi besarnya jumlah penduduk usia produktif menjadi produktivitas ekonomi sesungguhnya, sehingga mempercepat pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tantangannya, manfaat bonus demografi tidak akan optimal jika produktivitas penduduk rendah. Rendahnya produktivitas dapat diakibatkan malnutrisi penduduk. Malnutrisi (salah gizi) merupakan masalah kecukupan energi dan gizi seseorang akibat pola makan yang tidak tepat. Malnutrisi mencakup kekurangan gizi (*undernutrition*) maupun kelebihan gizi (*overnutrition*). Kondisi malnutrisi berdampak buruk terhadap kualitas hidup manusia, meningkatkan risiko penyakit dan komplikasi, menurunkan produktivitas.

Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) mengingatkan bahwa kurang gizi akan menghambat manusia mencapai potensi produktivitas terbaiknya. Siswa dengan gizi buruk cenderung berprestasi rendah di sekolah dan memengaruhi produktivitasnya di masa depan. Bagi penduduk usia produktif, kurang gizi menyebabkan rendahnya produktivitas kerja. Semakin rendah produktivitas pekerja, semakin rendah pendapatannya, semakin rendah pula kemampuan memenuhi kebutuhan gizi seimbang. Seorang Ibu hamil kurang gizi,

cenderung melahirkan bayi *stunting* dengan risiko kesehatan dan kemampuan kognitif yang buruk dalam jangka panjang.

### **Fakta Gizi dan Program Makan Bergizi Gratis**

Berdasarkan pengolahan data Susenas BPS 2019 (sebelum pandemi) dan 2023 (setelah pandemi), rata-rata pengeluaran makanan perkapita naik hingga 23,8 persen, dari sekitar 618 rupiah/bulan menjadi Rp 762 ribu/bulan. Namun rata-rata asupan kalori makronutrien (karbohidrat, protein, dan lemak) penduduk justru turun di seluruh kelompok pendapatan masyarakat. Artinya, biaya pemenuhan kecukupan energi dan gizi semakin mahal. Data tersebut belum memperhitungkan asupan mikronutrien (vitamin dan mineral) yang juga penting bagi tubuh manusia.

Tantangan gizi juga dialami kelompok remaja. Hasil *Global School-based Student Health Survey* (GSHS) Indonesia pada 2015 (kerjasama WHO dan Kemenkes) menunjukkan sejumlah perilaku berisiko pelajar SMP dan SMA terkait gizi. Diketahui 9,12 persen pelajar sekolah SMP dan SMA di Indonesia tidak pernah makan buah dalam 30 hari terakhir. Ada 44,6 persen siswa yang tidak pernah atau jarang sarapan. Selain itu, 68,3 persen pelajar SMP dan SMA jarang membawa bekal makan siang ke sekolah, meskipun pelajaran selesai setelah lewat jam makan siang. Data Riskesdas 2018 menunjukkan bahwa 8,7 persen remaja usia 13-15 tahun terkategori kurus dan sangat kurus yang mencerminkan kurang gizi. Sebaliknya, ada 16 persen remaja di usia yang sama mengalami obesitas dan kegemukan (kelebihan gizi). Ini menunjukkan bahwa hampir 25 persen remaja usia SMP mengalami masalah malnutrisi.

Berdasarkan pengelompokan rumah tangga menurut pengeluaran yang dilakukan BPS (2024), jumlah anggota rumah tangga di kelompok miskin mencapai angka 4,78 orang, lebih besar dibanding kelompok pengeluaran lainnya. Dengan harga pangan yang semakin mahal, pengeluaran makanan penduduk miskin cenderung meningkat tajam dan berpotensi mengurangi kemampuan mereka untuk pengeluaran nonmakanan seperti

pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Selain itu, mahalnnya harga pangan bagi kelompok miskin dapat berdampak terhadap menurunnya kemampuan pemenuhan gizi sehingga mempengaruhi kualitas modal manusia dalam jangka panjang, menciptakan *the vicious circle of poverty*. Oleh karena itu, intervensi pemerintah untuk gizi masyarakat dibutuhkan karena berdampak terhadap produktivitas penduduk dalam jangka panjang.

Pada tahun 2023, skor *Global Hunger Index* (GHI) Indonesia di angka 17,6 (sedang mendekati serius) dan berada di peringkat 77 dari 125 negara. Tentu pemerintah harus terus menekan angka GHI ini hingga setidaknya mencapai skor di bawah 9,9 (rendah). *Global Hunger Index* merupakan indikator untuk mengukur tingkat kelaparan di berbagai negara di dunia. GHI dirilis setiap tahun oleh organisasi internasional seperti Concern *Worldwide* dan *Welthungerhilfe*. Tujuannya untuk menggambarkan keadaan kelaparan di seluruh dunia dan merumuskan strategi untuk mengatasinya. GHI dihitung berdasarkan empat indikator utama:

1. Persentase penduduk kekurangan gizi, dengan indikator proporsi penduduk mengalami kekurangan asupan kalori;
2. *Stunting* (tinggi badan kurang) dengan mengukur prevalensi anak di bawah usia lima tahun yang tinggi badannya di bawah rata-rata akibat kurang gizi kronis;
3. *Wasting* (berat badan rendah), prevalensi anak di bawah usia lima tahun yang memiliki berat badan rendah dibanding tinggi badannya karena kurang gizi akut;
4. Angka kematian anak dengan menggunakan indikator persentase anak yang meninggal sebelum mencapai usia lima tahun.

Tingkat kelaparan di setiap negara dibagi menjadi beberapa kategori mulai dari rendah (di bawah 9,9) hingga sangat tinggi (di atas 50). Dengan mengumpulkan data dan menghasilkan skor untuk masing-masing negara, GHI dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan gizi dan intervensi untuk mengurangi kelaparan.

Mengacu pada berbagai fakta gizi di atas, pemerintah menyusun program intervensi untuk memperbaiki kondisi gizi masyarakat sebagai bagian dari strategi optimalisasi pemanfaatan bonus demografi. Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional mengalokasikan anggaran sekitar Rp 71 triliun dan berencana mengimplementasikan program makan bergizi gratis dengan target penerima antara 15 hingga 25 juta orang mulai Januari 2025. Program ini menjadi salah satu dari delapan program hasil terbaik cepat yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan bentuk investasi pemerintah untuk modal manusia (*human capital*), sehingga tidak bisa hanya dilihat dari sisi biaya saja. Program ini dapat memberikan *return* jangka panjang yang signifikan jika diterapkan secara optimal. Penyiapan pelaksanaan operasional lapangan yang komprehensif dan terukur akan memberikan manfaat optimal bagi tujuan program guna mendukung transformasi bangsa menuju Indonesia Emas 2045.

Memperhatikan berbagai tantangan yang ada, rencana program makan bergizi gratis yang akan diimplementasikan pemerintahan baru tentu sangat strategis. Namun demikian, ada berbagai aspek yang perlu menjadi pertimbangan dan masukkan agar program tersebut mencapai manfaat optimal.

1. Program ini perlu memprioritaskan pangan lokal dan partisipasi usaha kecil di masyarakat. Selain memberi manfaat perbaikan gizi, program MBG dapat menggerakkan ekonomi lokal yang melibatkan penduduk miskin dan rentan miskin. Penciptaan nilai tambah dan pendapatan dari program ini dapat mendukung target pengentasan kemiskinan dan pengembangan koperasi maupun UMKM;
2. Program ini berkesempatan melibatkan kantin atau pelaku UMKM makanan dan minuman di lingkungan sekolah. Selama ini, kantin atau penjual makanan/minuman di sekolah belum tereduksi dengan baik dan menjajakan makanan/minuman yang berbahaya untuk konsumsi anak. Program ini dapat

menurunkan risiko konsumsi makanan/minuman yang membahayakan kesehatan anak.

3. Tantangan *stunting* bukan hanya intervensi gizi untuk bayi dan anak baduta saja, melainkan juga untuk calon ibu sejak masuk usia pubertas. Selama ini, masalah tingginya angka kematian ibu melahirkan lebih banyak disebabkan oleh pendarahan saat persalinan. Risiko pendarahan meningkat saat ibu kekurangan zat besi, akibat pola makan yang kurang zat besi. Karena itu, intervensi program makan bergizi gratis ini dapat membantu para remaja putri untuk mengatasi masalah kekurangan zat besi sejak dini. Sehingga menurunkan risiko angka kematian ibu melahirkan, sekaligus mengurangi risiko *stunting* janin dan bayi yang dilahirkan;
4. Pelaksanaan program ini dapat dimanfaatkan sebagai sarana edukasi tentang gizi bagi peserta didik, guru, orang tua, dan berbagai pihak yang terkait. Selama ini, masalah gizi bukan semata-mata soal kemampuan ekonomi saja, melainkan juga terbatasnya pengetahuan masyarakat tentang gizi seimbang;
5. Perlunya mitigasi pengolahan pangan yang aman hingga proses penyajiannya, sehingga tidak menimbulkan risiko bagi para penerima manfaat. Beberapa jenis pangan dan susu relatif rawan basi. Jika dikelola dengan cara yang kurang tepat dapat menimbulkan gangguan pencernaan. Apalagi kondisi imunitas anak-anak belum terbentuk sempurna dan relatif bervariasi antar anak. Perlu adanya SOP yang jelas dan sertifikasi bagi petugas yang terlibat untuk menghindari risiko-risiko di lapangan seperti keracunan;
6. Makan secara psikologis merupakan aktivitas yang menyenangkan bagi anak-anak. Tentu setiap keluarga memiliki kebiasaan makan yang berbeda, yang membentuk pola makan setiap anak. Perlu antisipasi agar kegiatan makan bergizi gratis juga menjadi kegiatan yang menyenangkan sehingga memberi motivasi anak untuk makan. Perbedaan pola dan jam makan perlu

dipertimbangkan, di mana pada tahap permulaan, dimungkinkan tidak semua anak akan makan. Para psikolog mengingatkan bahwa perbedaan pola makan di rumah dan di sekolah berpotensi menimbulkan *stress* bagi anak. Oleh karena itu, penerapan program perlu disesuaikan dengan kebiasaan setempat dan dapat menghindari *food wasting*;

7. Program MBG juga dapat membangun karakter/mental penerima manfaat, seperti kebiasaan antre, membersihkan alat makan sendiri, menjaga kebersihan lingkungan, kebiasaan mencuci tangan sebelum dan setelah makan, dan sebagainya. Oleh karena itu, upaya untuk membangun perilaku positif tersebut dapat dirancang dengan baik sehingga memberi manfaat besar bagi pembangunan karakter bangsa;
8. Program ini dapat menekankan pemberdayaan berkeadilan, melibatkan partisipasi publik secara optimal dengan mendorong budaya gotong-royong, sehingga dapat berkelanjutan dalam jangka panjang.

## Penutup

Dalam mengoptimalkan potensi manfaat bonus demografi, pemerintah perlu menerapkan dua jenis kebijakan yaitu, (i) kebijakan intervensi untuk penduduk usia produktif agar memiliki produktivitas tinggi dan, (ii) kebijakan intervensi bagi penduduk bukan usia produktif. Penduduk usia produktif (15-64 tahun) berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Tantangannya, sekitar 57 persen angkatan kerja di Indonesia berpendidikan maksimal SMP. Padahal, dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat, permintaan tenaga kerja berpendidikan rendah semakin rendah. Pengembangan teknologi di negara maju salah satunya bertujuan mengatasi masalah kekurangan tenaga kerja (*labor shortage*) yang mereka alami. Sedangkan Indonesia memiliki tenaga kerja berlimpah yang didominasi pendidikan rendah. Oleh karena itu, *labor intensive industries* masih sangat dibutuhkan namun dengan *skill upgrading* yang dapat mengikuti perkembangan teknologi.

Sebagian besar penduduk usia produktif saat ini bukan penduduk usia sekolah. Dibutuhkan intervensi peningkatan keterampilan dan pendidikan bagi penduduk bukan usia sekolah yang melibatkan pendidikan luar sekolah. Program MBG bisa melibatkan partisipasi pekerja berpendidikan rendah namun dengan ketrampilan yang sesuai kebutuhan program. Misalnya, pengembangan peternakan untuk produksi susu kambing yang berkualitas, budidaya perikanan, pengolahan makanan sehat, dan sebagainya. Tentu program MBG dapat melibatkan aktivitas pelatihan ataupun pendidikan bagi tenaga kerja berpendidikan rendah. Bagi penduduk usia muda (di bawah 15 tahun), intervensi kebijakan MBG tentu diharapkan dapat efektif mengatasi masalah malnutrisi anak dan remaja, sehingga berdampak pada kualitas modal manusia Indonesia dalam jangka panjang. Namun, kebijakan ini harus dimonitor dengan indikator yang terukur dan jelas, sehingga manfaatnya dapat dievaluasi secara berkala.

Setidaknya ada tiga potensi manfaat dari program MBG terhadap optimalisasi pemanfaatan bonus demografi. *Pertama*, memperbaiki status gizi masyarakat dan berdampak terhadap produktivitas penduduk dalam jangka panjang. *Kedua*, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan keterampilan penduduk usia produktif berpendidikan rendah yang akan berdampak terhadap produktifitasnya. *Ketiga*, menggerakkan ekonomi lokal, mendorong ketahanan pangan daerah, dan mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kita berharap momentum *the window of opportunity* pada periode bonus demografi yang saat ini sedang berlangsung dapat dimanfaatkan secara optimal. Hal ini dapat mendukung target pertumbuhan ekonomi tinggi yang dicanangkan pemerintahan baru dan menciptakan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Sebelum periode bonus demografi berakhir pada 2041 nanti, Indonesia harus mampu mencapai status negara maju berpendapatan tinggi dengan indeks pembangunan manusia sangat tinggi. Jika ini terwujud, maka “kita akan kaya sebelum tua”.

Indonesia memasuki babak baru pemerintahan periode 2025-2029. Periode pemerintahan ini merupakan periode penting sebagai landasan pencapaian Visi Indonesia Emas 2045 yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Namun demikian, upaya mencapai target tersebut bukanlah hal yang mudah dilakukan, terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan, belum lagi tantangan global semakin meningkat.

Buku Pemikiran 100 Ekonom Indonesia 2024 berjudul Estafet Kepemimpinan Baru Menuju Akselerasi Ekonomi, menghadirkan pemikiran para ekonom Indonesia dalam merespon persoalan dan tantangan yang perlu diselesaikan dalam lima tahun ke depan. Buku ini dibagi dalam empat klaster yang menjadi tantangan besar dalam ekonomi Indonesia, yaitu: 1. Pangan dan Energi; 2. Industri, Investasi, dan UMKM; 3. Fiskal, Moneter, dan Keuangan; dan 4. Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan.

Buku ini diharapkan dapat memberikan masukan rekomendasi pada pemerintahan yang baru untuk dapat mengakselerasi ekonomi agar dapat mewujudkan target pertumbuhan ekonomi dalam rangka mencapai Indonesia Emas 2045 dan mewujudkan cita-cita bangsa yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yaitu: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Lebih luasnya, Buku Pemikiran 100 Ekonom Indonesia diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi dan tantangan ekonomi Indonesia serta upaya untuk memberi manfaat pada seluruh masyarakat Indonesia dalam memahami kondisi ekonomi Indonesia dan upaya yang dapat dilakukan untuk menghadapi tantangan dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan Indonesia Emas 2045.

---

INDEF

Jl. Batu Merah No, 45  
Pejaten Timur, Jakarta 12510  
[www.indef.or.id](http://www.indef.or.id)

